

**Rekomendasi Kebijakan Mengatasi Diskriminasi Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Bagi Suku Mentawai
(Studi Kasus Sd Filial Sdn 28 Sagulubbek Dusun Tepuk, Desa Sagulubbek)**

Riko Riyanda^{1*}, Doni Hendri²

Universitas Andalas

Riyanda.fisip@gmail.com, hendrik_doni@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan mengatasi diskriminasi aksesibilitas pelayanan pendidikan bagi Suku Mentawai (studi kasus Sd Filial SDN 28 Sagulubbek Dusun Tepuk, Desa Sagulubbek) Kabupaten Mentawai. Daerah ini terletak dalam kondisi pedalaman dengan medan geografis yang sulit di akses. Pada situasi tersebut dihadapkan pada permasalahan yang kompleks seperti infrastruktur sekolah yang tidak layak, ketersediaan guru yang minim dan dukungan anggaran yang tidak berpihak pada kebijakan perbaikan infrastruktur sekolah. Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi lapangan dan wawancara mendalam. Rekomendasi kebijakan pada penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan akses pendidikan di Dusun Tepuk memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dan kontekstual, meliputi pembangunan infrastruktur dasar, redistribusi guru dengan insentif khusus, peningkatan status sekolah filial menjadi sekolah definitif, pengembangan kurikulum berbasis budaya lokal Mentawai, serta monitoring berkala dengan standar daerah yang aksesnya sulit dijangkau. Tanpa perubahan kebijakan yang lebih responsif, ketimpangan pendidikan di Mentawai akan tetap berlanjut dan menghambat pembangunan sumber daya manusia daerah.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Diskriminasi, Pelayanan Pendidikan, Rekomendasi Kebijakan

Abstract

This study aims to provide policy recommendations to address discrimination in accessibility to educational services for the Mentawai Indigenous Community (a case study of SD Filial SDN 28 Sagulubbek, Tepuk Hamlet, Sagulubbek Village, Mentawai Regency). The area is located in a remote region with challenging geographic conditions that are difficult to access. In this situation, the community faces complex issues such as inadequate school infrastructure, a shortage of teachers, and an education budget that does not prioritize investments in improving school facilities. The research employs a qualitative descriptive approach using field observations and in-depth interviews. Accordingly, the policy recommendations of this study conclude that improving educational access in Tepuk Hamlet requires comprehensive and contextual policy interventions. These include the development of basic infrastructure, redistribution of teachers with special incentives, upgrading the status of the filial school to a definitive public school, development of a curriculum based on Mentawai local culture, and periodic monitoring adapted to the standards of hard-to-reach areas.

Without more responsive policy changes, educational inequality in Mentawai will persist and continue to hinder the development of local human resources.

Keyword: Accessibility, Discrimination, Educational Services, Policy Recommendations

PENDAHULUAN

Penelitian ini menganalisis tentang kebijakan mengatasi aksesibilitas pelayanan pendidikan bagi Suku Mentawai (Studi Kasus SD Filial SD N 28 Sagulubbek Dusun Tepuk, Desa Sagulubbek). Tema ini penting untuk dikaji, karena secara teoritis disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Artinya, setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang layak dan bermutu tanpa melihat kondisi dan latar belakang kehidupan seseorang. (Khairuddin, 2020)

Adanya regulasi yang menjamin secara jelas hak-hak suku laut, memberikan harapan bagi mereka dalam memperoleh pendidikan yang layak seperti warga masyarakat lainnya. Meskipun demikian, kondisi hidup di pulau yang dikelilingi lautan tidak seperti hidup normal biasanya, hidup di daerah pulau terpencil memerlukan perhatian dan pelayanan khusus terhadap akses pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Dwiyanto (2010:175) bahwa sistem pendidikan harus dapat menjawab masalah yang mereka hadapi dalam mengakses pelayanan pendidikan. Apabila sistem pelayanan pendidikan tidak mampu memberikan perhatian dan perlakuan yang khusus kepada kelompok-kelompok marjinal, maka tanpa disadari sistem pendidikan telah mencegah mereka untuk dapat mengakses pelayanan pendidikan.

Diskriminasi dalam akses pendidikan tampak jelas pada kasus yang dialami para siswa di SD Filial SDN 28 Sagulubbek, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Para siswa terpaksa mengikuti pembelajaran di lantai beralaskan karung, dengan meja kayu sederhana hasil swadaya guru. Kondisi SDN 28 tersebut sangat memprihatinkan karena sarana dan prasarana yang tersedia sangat terbatas dan jauh dari standar kelayakan, termasuk kekurangan bangku belajar. Upaya meminjam bangku dari gereja sempat dilakukan, namun hanya berlangsung singkat karena adanya aturan gereja yang tidak mengizinkan peminjaman dalam jangka panjang. Selain itu, sekolah filial ini menghadapi persoalan jarak yang cukup jauh dari sekolah induk, yaitu sekitar 12 kilometer, yang hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki dan menggunakan perahu mesin pompong.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan khusus dari penelitian ini adalah merumuskan rekomendasi kebijakan mengatasi diskriminasi aksesibilitas pelayanan pendidikan bagi Suku Mentawai (Studi Kasus SD Filial SDN 28 Sagulubbek Dusun Tepuk, Desa Sagulubbek), kemudian Pemerintah Kabupaten Mentawai dapat menghadirkan pelayanan yang lebih inklusif, responsif, murah dan berkeadilan di bidang pendidikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam menganalisis hasil penelitian, penulis menggunakan teori aksesibilitas. Purwanto (2012:106-107) menjelaskan bahwa akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Akses juga diartikan adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran apabila mereka membutuhkan informasi atau menyampaikan pengaduan. Akses juga mengandung pengertian kesamaan kesempatan bagi kelompok sasaran apapun karakteristik individual maupun kelompok kepentingan yang melekat pada dirinya, seperti gender, etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan demikian, akses juga dapat berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

Sedangkan *Merriam-Webster* (1993) dalam *Ekowati* (2012:43) akses adalah kebebasan atau kemampuan untuk memperoleh atau mengambil manfaat atau sesuatu. Istilah akses berhubungan erat dengan istilah kepemilikan (*property*) yang dicirikan oleh Pershon (1978) sebagai sesuatu hak atas sebuah klaim untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari

sesuatu. Disini perbedaan krusial antara akses dan kepemilikan adalah pada istilah "kemampuan" dan "hak". Istilah "hak" mengandung implikasi sebuah klaim yang diakui dan masyarakat mendukungnya (baik melalui hukum, norma, atau konvensi). Kepemilikan hanya mencakup *de jure*, sedangkan akses meliputi *de jure* dan *de facto* atau ekstra legal (Subkhan (2006) dalam Ekowati (2012:44)).

Di sisi lain, Aday (1993) dalam Sofyan (2008: 13) mendefinisikan akses dalam konteks indikator struktural seperti karakteristik sistem pelayanan dan dalam konteks keinginan, yaitu kebutuhan dan sumber daya yang muncul dalam proses pencarian pelayanan, dengan kata lain akses terkait dengan beberapa konsep diantaranya :

1. Adanya kesesuaian antara klien dengan sistem pelayanan itu sendiri, dapat dipahami bahwa bila terjadi kecocokan baik itu menyangkut sistem pelayanan dengan apa yang dibutuhkan oleh klien, maka akses akan mudah untuk didapat dan memenuhi kebutuhan antara keduanya.
2. Suatu jaminan ketersediaan sumber daya: ketersediaan sumber daya akan memicu seseorang untuk memperoleh yang diinginkannya. Keterkaitan pihak sebagai penyedia (*supplier*) dengan yang membutuhkan (*demand*) sangat mendukung pelaksanaan akses itu sendiri.
3. Pemanfaatan sumber daya yang setara dengan kebutuhan akan menjadikan akses keduanya akan terhubung dengan baik dan akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan suatu pelayanan.

Dan menurut Julianto (2008) di dalam aksesibilitas harus mencakup tiga dimensi antara lain :

1. Non diskriminasi; pendidikan harus bisa diakses oleh semua orang tanpa ada diskriminasi baik itu diskriminasi suku, ras, agama, jenis kelamin dan terhadap kelompok-kelompok masyarakat rentan secara hukum, fakta, tanpa diskriminasi terhadap kawasan-kawasan yang dilarang manapun.
2. Aksesibilitas fisik; pendidikan harus secara fisik aman untuk dijangkau.
3. Aksesibilitas ekonomi; biaya pendidikan haruslah murah dan terjangkau oleh setiap warga negara. Maksudnya pendidikan haruslah bebas semua biaya bagi semua orang. Dan kewajiban negara haruslah secara progresif memperkenalkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang bebas biaya.

Danim (2005) dalam Sofyan (2008:24-25) menjelaskan bahwa pemerataan kesempatan pendidikan (*equality of educational opportunity*) menganut dimensi aksesibilitas pendidikan (*educational accessibility*) dan ekuitas atau keadilan pendidikan (*educational equity*) itu sendiri. Faktor-faktor kultural, perbedaan individual, bias jender, kemampuan ekonomi keluarga, lingkungan geografis dan sebagainya terbuka tentang hak dan peluang yang sama. Akan tetapi, dilain hal selalu muncul perbedaan akses populasi dalam menerima layanan pendidikan dan pembelajaran secara layak.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan dan kesamaan untuk mendapatkan kesempatan dalam memanfaatkan pelayanan pendidikan. Adapun yang menjadi indikator pengukuran aksesibilitas pelayanan pendidikan dalam penelitian ini aksesibilitas fisik (ketersediaan sarana dan prasarana pendukung), serta aksesibilitas ekonomi.

Selain dari aksesibilitas pendidikan penulis menggunakan teori kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang tepat, diharapkan dapat mencetak peserta didik yang kreatif, mandiri dan profesional. Sebagaimana pendidikan itu sendiri merupakan suatu fungsi sosial, menetapkan arah perkembangan dari peserta didik yang belum dewasa menjadi partisipasi dalam hidup kelompok di mana dia berada. Oleh sebab itu, Tilaar dan Nugroho (2008:140) mengatakan bahwa kebijakan pendidikan (*education policy*) adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi

pendidikan, sedangkan *Goertz* dalam Tilaar dan Nugroho (2008:268) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan.

Dengan adanya regulasi yang mengatur tentang pendidikan di Indonesia, maka setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam mengakses pelayanan pendidikan termasuk bagi masyarakat suku terpencil. (Rohmatul Hasanah, 2025) Sebagaimana juga dijelaskan dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 4 (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pernyataan tersebut juga diperkuat dalam pasal 5 ayat 3 dengan menyebutkan bahwa warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

METODE PENELITIAN

Untuk memahami bagaimana menganalisis kebijakan mengatasi diskriminasi aksesibilitas pelayanan pendidikan bagi Suku Mentawai SDN Filial SDN 28 Desa Sagulubek Kabupaten Mentawai, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution dalam Sugiono, 2009:180).

Secara spesifik penelitian ini berjenis penelitian deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu (Azwar, 2003:6-7). Lokasi penelitian dilakukan di Dusun Tepuk, Desa Sagulubek Kabupaten Mentawai, sedangkan fokus penelitian diarahkan pada rekomendasi kebijakan terkait dengan diskriminasi rekomendasi kebijakan mengatasi diskriminasi aksesibilitas pelayanan pendidikan bagi suku mentawai terhadap SD Filial SDN 28 Sagulubek.

Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka. Diantara subjek dalam penelitian ini meliputi: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mentawai, Kasi Perencanaan dan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Mentawai, Komisi DPRD Mentawai yang mengurus divisi pendidikan, Kepala Desa Sagulubek, Kepala Sekolah, Guru-Guru, Orang Tua anak-anak SDN 28 Sagulubek, serta anak-anak SD N Sagulubek.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Pengamatan (*observation*) awal terhadap lokasi penelitian dengan melihat kondisi SD Filial SDN 28 Sagulubek Dusun Tepuk, Desa Sagulubek Kabupaten Mentawai. Pada tahap ini peneliti juga akan mengumpulkan data sekunder sebagai landasan untuk menyusun pedoman wawancara. Adapun *output* yang diharapkan pada tahap ini adalah tersedianya data tentang jumlah anak murid SD Filial SDN Sagulubek yang dapat mengakses pelayanan pendidikan dan menikmati fasilitas proses belajar mengajar.

Menyusun pedoman wawancara sebagai instrumen pengumpulan data yang utama. Pedoman wawancara disusun berdasarkan data-data sekunder yang diperoleh di lapangan. Pengumpulan data primer, data ini diperoleh dari subjek penelitian sebagai bahan dalam menganalisis temuan penelitian. Hasil temuan tersebut data dikumpulkan dengan mengacu kepada pedoman wawancara. *Output* yang diharapkan dari tahap ini adalah diperolehnya data primer yang bisa diolah sesuai dengan kebutuhan. Indikator capaian pada tahap ini adalah peneliti berhasil mendapatkan data primer yang telah diperoleh dari subjek penelitian.

Apabila semua data sudah terkumpul, peneliti akan melakukan reduksi data dengan mengkategorikan, memilih dan menyatukan informasi-informasi penting yang bisa dianalisis dan dibuatkan penjelasan-penjelasan sesuai dengan tujuan penelitian. *Output* yang dihasilkan dari tahap ini adalah peneliti memperoleh gambaran yang valid dan reliabel

dengan tujuan penelitian. Sedangkan indikator capaiannya ialah terjawabnya masalah penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan secara sistematis agar memudahkan proses interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan temuan empiris di lapangan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi agar informasi yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua stakeholder yang ada di Mentawai semuanya sepakat bahwa Pendidikan adalah aset masa depan dalam membentuk SDM yang berkualitas. Setiap daerah termasuk Mentawai dituntut menciptakan pendidikan yang bisa meningkatkan kualifikasi SDM-nya sesuai dengan situasi dan kebutuhan daerah. Namun peningkatan SDM ini perlu ditangani oleh sistem pendidikan yang baik, pengelola yang profesional, tenaga guru yang bermutu, sarana belajar yang cukup, dan anggaran pendidikan yang cukup. Di sinilah permasalahannya, daerah seperti Dusun Tepuk Desa Sagulubek Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Mentawai pendidikannya masih tertinggal, biasa saja atau lebih buruk dari kondisi yang terlihat di lapangan.

Bentuk Diskriminasi kebijakan Aksesibilitas Pendidikan Di SDN 28 Sagulubek

1. Infrastruktur Sangat Minim

Studi di lapangan memperlihatkan fakta murid-murid belajar di lantai dengan alas karung dibenarkan oleh Plt Kepala SDN 28 Sagulubek Bapak Basilius Sakeletuk. "Saya menyampaikan benar adanya siswa kita duduk di lantai beralaskan karung, karena keterbatasan bangku dan meja. Tahun ini sudah diusulkan mobiler tapi dicoret, di perubahan anggaran diajukan lagi,

Sebenarnya dalam sudah diajukan, akan tetapi tidak disetujui dan dikabulkan, padahal kebutuhan ini betul-betul urgen. Bukan hanya sekolah filial saja yang membutuhkan, sekolah indukpun juga sangat membutuhkan. Berdasarkan hasil temua data dari informan, bahwasannya tempat guru mengajar memrihatinkan, siswa belajar di lantai dengan memakai alay karungm sedang mejanya seperi bangku yang dibuat hasil swadaya guru sendiri. Sekolah SD filiah SDN 28 Sagulubek ini ada tiga ruang, satu yang guru, dua ruang belajar. Dari dua ruang belajar itu dibagi lagi, untuk satu ruang itu disekat untuk ruang belajar kelas satu dan dua, kemudian ruang tiga itu disekat jadi dua, satu untuk kelas tiga dan empat, satu ruang lagi untuk kelas lima dan enam. Dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Keadaan infrastruktur atau fisik sekolah memang tidak layak, kondisi sarana dan prasarana sekolah memperlihatkan sebagai berikut:

- Kondisi Belajar: Para siswa di sekolah filial (kelas jauh) tersebut terpaksa belajar dengan cara duduk di lantai yang hanya beralaskan karung.

- Fasilitas Seadanya: Meja belajar dibuat dari kayu secara swadaya oleh para guru setempat. Sekolah tersebut hanya memiliki tiga ruangan, dengan satu ruangan digunakan sebagai ruang guru dan dua ruangan sebagai ruang kelas.
- Perhatian Publik dan Pemerintah: Kondisi ini dikabarkan oleh media lokal dan nasional, yang kemudian mendapat perhatian dari Pj Bupati Kepulauan Mentawai yang baru dilantik pada saat itu. Pj Bupati bahkan menemukan langsung kondisi tersebut saat kunjungan ke lokasi.
- Tindak Lanjut: Plt Kepala SDN 28 Sagulubbek membenarkan kondisi tersebut, dan pemberitaan ini memicu diskusi mengenai keadilan akses pendidikan di daerah terpencil dan tantangan kualitas pendidikan di Mentawai.

Saat ini jumlah seluruh siswa mencapai 41 orang, dengan rincian kelas satu sebanyak 11 siswa, kelas dua 10 siswa, dan kelas tiga hingga kelas enam masing-masing berjumlah 5 siswa. Adapun tenaga pendidik yang tersedia hanya 4 orang, terdiri dari dua guru kontrak dan dua guru honorer. Persoalan ini sebenarnya telah disampaikan oleh pihak sekolah kepada Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai, hingga DPRD Mentawai. Tetapi, hingga sekarang belum ada alokasi anggaran yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sekolah tersebut. Secara ringkas, "kasus" ini merujuk pada terungkapnya kondisi infrastruktur pendidikan yang tidak layak dan minim fasilitas di daerah terpencil seperti Dusun Tepuk, Desa Sagulubbek yang menuntut perhatian dan solusi dari pemerintah daerah.

2. Jarak tempuh yang berat

Kondisi jarak tempuh yang berat menjadi kendala yang serius terhadap akses pendidikan dasar di Dusun Tepuk, Desa Sagulubbek. Secara geografis wilayah ini termasuk wilayah pedalaman Mentawai dengan daerah perbukitan, infrastruktur jalan yang belum memadai mobilitas siswa dan guru geraknya terhambat. Sering kali guru-guru dan murid berjalan kaki dengan jarak tempuh antara 1 hingga 2 jam setiap hari. Dari kondisi medan perjalanan memprihatinkan, di era yang sudah sangat maju masih ditemukan daerah yang hanya dilalui dengan jalan setapak, jembatan kayu yang sifatnya tidak permanen, serta sungai kecil yang harus dilewati dengan penuh resiko. Kalau sudah tiba musim hujan secara otomatis kegiatan belajar dihentikan karena mempertimbangkan keselamatan. Implikasi dari hambatan geografis ini pada gilirannya akan berdampak kepada ketidakstabilan konsistensi kehadiran, kelelahan fisik yang dengan sendirinya menurunkan konsentrasi belajar siswa. Pada guru juga mengalami tantangan dan kesulitan yang sama sehingga menyebabkan proses belajar mengajar terhambat dan tidak berjalan maksimal.

Diskriminasi terhadap aksesibilitas pendidikan ini tentu saja menciptakan ketimpangan struktural dalam pemenuhan hak pendidikan, di mana anak-anak Dusun Tepuk tidak memperoleh akses pendidikan dasar yang setara dibandingkan dengan wilayah yang memiliki infrastruktur lebih baik. Ketidakteraturan proses belajar, risiko keselamatan, dan dampak psikologis berupa menurunnya motivasi sekolah berpotensi meningkatkan angka ketidakhadiran dan risiko putus sekolah dalam jangka panjang.

3. Kurangnya Dukungan Anggaran

Kurangnya dukungan anggaran tidak dapat dipungkiri membuat SD Filial SDN 28 Sagulubbek di Dusun Tepuk menghadapi banyak kendala, keterbatasan anggaran yang minim karena tidak mendapatkan dana langsung dan bergantung pada sekolah induk serta bantuan dari pemerintah daerah. Implikasi dan dampak dari kebijakan ini sejatinya menyebabkan kebutuhan operasional, fasilitas, dan kebutuhan guru sulit terpenuhi dengan baik, sehingga kualitas pendidikan menurun. Tidak banyak yang bisa dilakukan ketika optimalisasi anggaran sangat terbatas untuk menunjang infrastruktur.

Anggaran yang sangat terbatas hanya diperuntukkan untuk fasilitas sekolah yang

sangat sederhana, dicermati ruang kelas terbatas dan minim sanitasi serta listrik yang sering kali padam. Ketidakadilan dalam perencanaan anggaran pendidikan menyebabkan sekolah filial di daerah terpencil seperti Dusun Tepuk kurang diprioritaskan, memperlebar kesenjangan layanan pendidikan dengan wilayah yang lebih mudah dijangkau. Tanpa kebijakan alokasi dana langsung dan dukungan yang nyata, ketimpangan pada aksesibilitas pendidikan di Mentawai akan terus dirasakan. Oleh sebab itu kasus ini harus menjadi bahan perhatian pemerintah dan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk terus membangun infrastruktur daerah-daerah terpencil, terdepan dan terluar seperti Dusun tepuk Kabupaten Mentawai. Ini bukan tentang siapa yang pantas dan lebih dulu tapi ini soal keadilan yang harus didapat oleh semua anak bangsa, tak terkecuali SD Filial SDN 28 Sagulubbek yang viral di media sosial.

Rekomendasi kebijakan mengatasi diskriminasi aksesibilitas pelayanan pendidikan bagi SD Filial SDN 28 sagulubbek dusun tepuk, desa sagulubbek)

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar: Jalan, Ruang Kelas Permanen, dan Sanitasi

Di wilayah pedalaman seperti Dusun Tepuk, pembangunan infrastruktur dasar sangat penting untuk memberikan akses pendidikan yang layak. Agar mobilitas siswa dan guru tidak lagi terhambat oleh kondisi geografis yang sulit, pemerintah kabupaten harus memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan jalan menuju dusun. Selain itu, pembangunan ruang kelas permanen sangat penting untuk menggantikan bangunan sementara yang tidak memenuhi standar keamanan dan rentan terhadap cuaca. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung keberlanjutan pembelajaran, diperlukan fasilitas sanitasi yang layak seperti toilet, sumber air bersih, dan tempat cuci tangan. Berbagai intervensi pendidikan lainnya akan sulit berjalan dengan baik jika tidak ada infrastruktur dasar yang memadai.

2. Distribusi Guru Berbasis Wilayah Terpencil dengan Insentif Khusus

Kebijakan distribusi guru harus mempertimbangkan aspek geografis dan keterpencilan setiap wilayah. Untuk mengatasi kekurangan guru di Dusun Tepuk, pemerintah daerah dapat menerapkan sistem penugasan berbasis zonasi wilayah terpencil dengan memberikan insentif khusus seperti tunjangan daerah khusus, subsidi untuk transportasi, dan skema penempatan selama minimal dua hingga tiga tahun. Selain itu, sangat penting untuk memprioritaskan pengangkatan guru dari komunitas lokal karena mereka lebih siap untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan geografis dan sosial Mentawai. Untuk menjaga kontinuitas pembelajaran di sekolah filial, guru harus menerima insentif yang jelas dan memadai.

3. Penguatan Sekolah Filial menjadi Sekolah Definitif Agar Mendapat Anggaran Penuh

Untuk menjamin alokasi anggaran yang lebih stabil, langkah strategis yang diambil adalah mengubah status SD Filial SDN 28 Sagulubbek menjadi sekolah definitif. Sekolah-sekolah yang telah menetapkan status definitif akan memiliki kemampuan untuk mendapatkan dana BOS langsung, mendapatkan prioritas dalam pembangunan sarana-prasarana, dan menerima penambahan formasi guru sesuai kebutuhan. Saat ini, sekolah filial bergantung pada kebijakan sekolah induk dan pembagian anggaran, yang seringkali tidak memenuhi kebutuhan nyata sekolah. Pemerintah dapat memastikan bahwa layanan pendidikan di Dusun Tepuk memiliki dasar administrasi dan keuangan yang lebih kuat dengan meningkatkan statusnya.

4. Program Sekolah Berbasis Budaya Lokal Mentawai (Local Wisdom Curriculum)

Kurikulum yang didasarkan pada kearifan lokal Mentawai dapat menjadi metode penting untuk meningkatkan relevansi pendidikan, memperkuat identitas budaya, dan menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah. Kurikulum ini dapat mencakup materi tentang tradisi sosial, pengetahuan tentang hutan, seni-budaya Mentawai, dan praktik sehari-hari yang sesuai dengan konteks lokal. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan budaya lokal dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kolaborasi antara sekolah dan komunitas adat, dan membantu siswa memahami pembelajaran melalui perspektif yang dekat dengan kehidupan mereka sendiri. Guru juga perlu dilatih untuk membuat pembelajaran kontekstual berdasarkan prinsip kearifan budaya lokal.

5. Monitoring Berkala oleh Dinas Pendidikan dengan Standar Evaluasi Khusus Daerah Sulit

Dinas Pendidikan harus melakukan monitoring secara berkala dengan alat evaluasi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah pedalaman untuk memastikan bahwa pendidikan berjalan dengan baik. Tidak perlu fokus pada metrik umum seperti nilai akademik atau kehadiran; evaluasi juga harus mempertimbangkan aksesibilitas, kondisi infrastruktur, beban perjalanan siswa, stabilitas tenaga pendidik, dan kebutuhan unik siswa di wilayah terpencil. Kebijakan berbasis data memerlukan laporan monitoring yang dilakukan minimal dua kali setahun. Intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan tidak mengabaikan konteks sosial budaya dan geografis lokal dengan penerapan standar evaluasi khusus.

6. Kemitraan dengan LSM dan Gereja untuk Dukungan Fasilitas dan Literasi

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan sumber daya pemerintah, gereja, komunitas lokal, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat bekerja sama secara strategis. LSM dapat menawarkan dukungan dalam hal pelatihan guru, program literasi, bantuan untuk fasilitas belajar, dan pendampingan manajemen sekolah. Keberadaan Gereja sangat penting bagi masyarakat Mentawai, juga dapat menjadi mitra penting dalam menyediakan ruang belajar sementara, penggalangan dana lokal, dan menyediakan dukungan sosial bagi siswa. Koaborasi ini sangat penting untuk meningkatkan keberlanjutan pendidikan di SD Filial SDN 28 Sagulubbek, kerja sama ini tidak berhenti pada suatu waktu namun terus berkelanjutan, terutama saat anggaran negara kurang. Sekolah filial dapat bergantung pada dukungan yang lebih luas dengan bekerja sama dengan berbagai lini sektor.

KESIMPULAN

Upaya mengatasi diskriminasi aksesibilitas pendidikan pada SD Filial SDN 28 Sagulubbek di Dusun Tepuk memerlukan intervensi kebijakan yang terarah dan berbasis kebutuhan lokal. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan sebagai fondasi peningkatan layanan. Pembangunan akses jalan antar-dusun, ruang kelas permanen, dan fasilitas sanitasi harus diintegrasikan secara konsisten dalam perencanaan pembangunan daerah. Infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat esensial untuk mengurangi hambatan geografis yang selama ini menghambat pemerataan pendidikan. Dalam aspek sumber daya manusia, Dinas Pendidikan perlu menerapkan kebijakan redistribusi guru untuk wilayah terpencil yang disertai insentif daerah sulit, fasilitas hunian, dan dukungan transportasi. Kebijakan ini diperlukan untuk memastikan keberadaan tenaga pendidik yang stabil dan kompeten, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung optimal di wilayah terisolasi.

Peningkatan status sekolah filial menjadi sekolah definitif juga perlu dilakukan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan kemandirian administratif. Dengan status definitif, sekolah memperoleh akses langsung terhadap anggaran, termasuk dana BOS, formasi guru tambahan, serta prioritas pembangunan sarana prasarana. Pada aspek pedagogis, perlu diperkuat pengembangan kurikulum kontekstual berbasis budaya lokal Mentawai guna meningkatkan relevansi pembelajaran dan mendorong keterlibatan masyarakat. Integrasi kearifan lokal dalam proses pendidikan juga dapat memperkuat identitas budaya peserta didik.

Selanjutnya, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala dengan instrumen yang disesuaikan dengan karakteristik daerah sulit. Hasil evaluasi harus menjadi dasar perumusan kebijakan berbasis data agar intervensi lebih tepat sasaran. Akhirnya, penguatan kemitraan multisektor dengan LSM, lembaga keagamaan, dan komunitas adat perlu dioptimalkan untuk mendukung penyediaan fasilitas, program literasi, serta dukungan sosial bagi peserta didik. Seluruh intervensi harus dilaksanakan secara inklusif dan transparan guna memastikan masyarakat Mentawai memperoleh layanan pendidikan yang setara dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik & Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana
- Dwiyanto, Agus. (2010). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik, Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: UGM Press
- Ekowati, Tatik. 2012. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pendidikan pada sekolah RSBI/SBI(studi kasus RSBI SMKN 2 Salatiga).Tesis Jurusan Magister Administrasi Publik. Yogyakarta: UGM
- Hardiansyah. 2011.*Kualitas pelayanan publik, konsep dimensi, indikator dan implementasinya*. Yogyakarta : Gava Media
- Hasanah. Rohmatul (2025). Ketimpangan Akses Pendidikan Di Daerah Terpencil: Isu HAM Dan Kebijakan Hukum Di Indonesia, In *Maret* (Vol. 4, Issue 1).
- Khairuddin, (2020). PENDIDIKAN INKLUSIF DI LEMBAGA PENDIDIKAN. *Tazkia*, 1(IX), 82–104. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya>
- Yulianto, M Joni. 2014. *Konsepsi Difabilitas dan Pendidikan Inklusif*. Journal of Disability Studies Inklusi Vol 1, No 1 januari-Juni 2014
- Pramusinto, Agus. 1989. Pemerataan Pelayanan Kredit Pedesaan (Suatu Perbandingan antara Badan Kredit Kecamatan dan Sektor Kredit Desa). Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol. Yogyakarta: UGM
- Purwanto, E. A dan Sulistyastuti, D. R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Sofyan, Agus. 2008. Aksesibilitas Pendidikan bagi Masyarakat Terasing (Study Analisis Aksesibilitas Pendidikan bagi Masyarakat Suku Akit di Kecamatan Rupert). Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik. Yogyakarta: UGM

Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2012. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar